

BAB I PENDAHULUAN

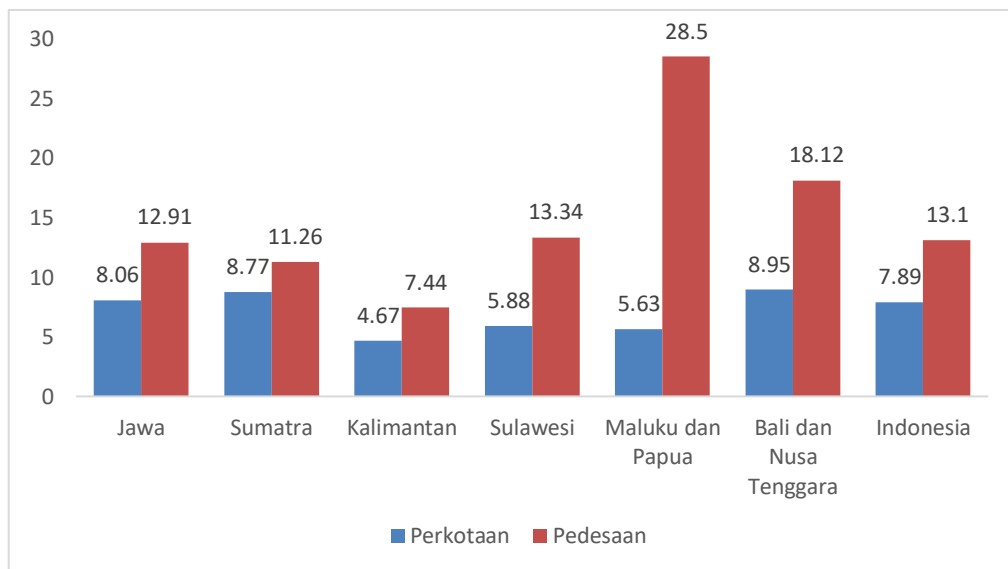
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sedang gencar melakukan pembangunan nasional di semua sektor. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke IV yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Undang-undang 1945 dan Amandemen).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih baik untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Suripto & Subayil, 2020). Indikator kesejahteraan dapat dilihat dari tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan suatu Negara. Kemiskinan merupakan masalah social yang dialami oleh semua Negara, terutama Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berupaya untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi. Di Indonesia kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang harus ditangani oleh pemerintah. Meskipun sudah banyak program yang dilaksanakan pemerintah guna mengatasi masalah kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian, begitu juga pembangunan di pedesaan. Pemerintah berupaya untuk membangun daerah pedesaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat

desa. Namun, upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil yang maksimal (Firdaus, 2020). Keanekaragaman yang ada di desa dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Tujuan utama pembangunan pedesaan adalah untuk memberikan peluang terhadap daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi, baik regional maupun nasional (Darwita & Redana, 2018). Berikut adalah persentase penduduk miskin menurut pulau tahun 2021.



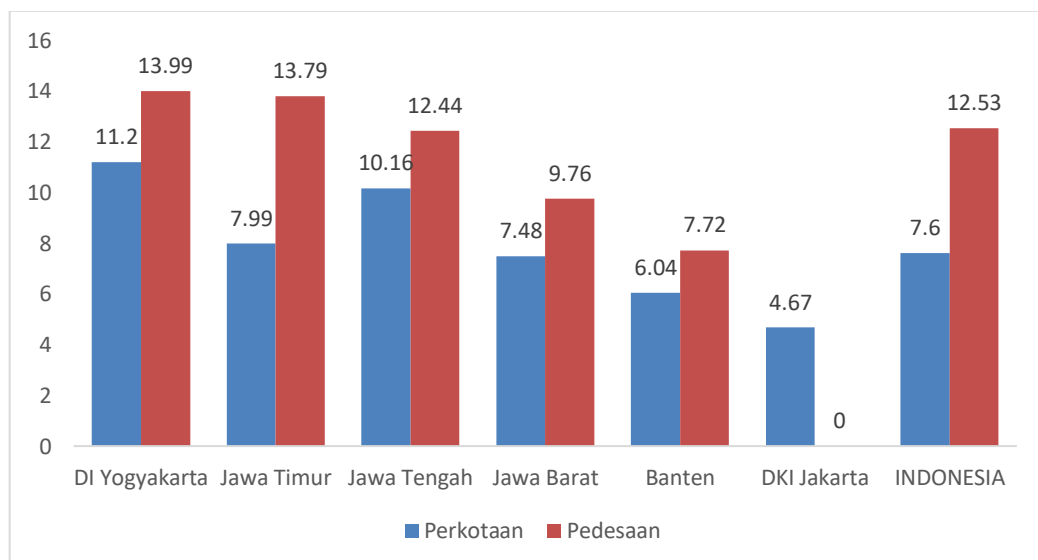
Grafik 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 diketahui bahwa, sebagian besar penduduk miskin yang ada di Indonesia berdomisili di pedesaan. Kemiskinan yang terjadi di pedesaan disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya putus sekolah, angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka pernikahan dini, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang terdapat di desa. Hal ini menunjukkan bahwa, program pengentasan kemiskinan harus lebih difokuskan pada pedesaan, karena pedesaan sebagai penyumbang pangan nasional dan sebagai domisili penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Pembangunan di pedesaan merupakan

salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Dengan adanya pembangunan di pedesaan, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian dapat mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan (Salam & Marwini, 2018).

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih banyak berdomisili di pulau Jawa dan di daerah pedesaan. Menurut sensus penduduk tahun 2020, 56 persen penduduk Indonesia terdapat di pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki enam provinsi diantaranya provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Masih tingginya angka kemiskinan mendorong pemerintah Indonesia untuk mengurangi tinggnya angka kemiskinan, diantaranya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, mendukung usaha mikro, memberikan subsidi kepada masyarakat, memberikan bantuan langsung, mengembangkan balai latihan kerja, memberikan layanan kesehatan yang murah, dan lain-lain.



Grafik 1. 2 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia beberapa waktu terakhir, menimbulkan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, bahkan perekonomian. Perekonomian yang terhambat menciptakan berbagai dampak, salah satunya adalah melonjaknya angka kemiskinan. Pedesaan yang terdapat di Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi kedua di Pulau Jawa pada tahun 2021 dengan 13,79 persen. Persentase ini melebihi persentase kemiskinan nasional. Persentase kemiskinan Indonesia untuk daerah pedesaan tahun 2021 adalah 12,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Jawa Timur termasuk dalam kemiskinan yang parah. Berikut adalah 10 kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur.

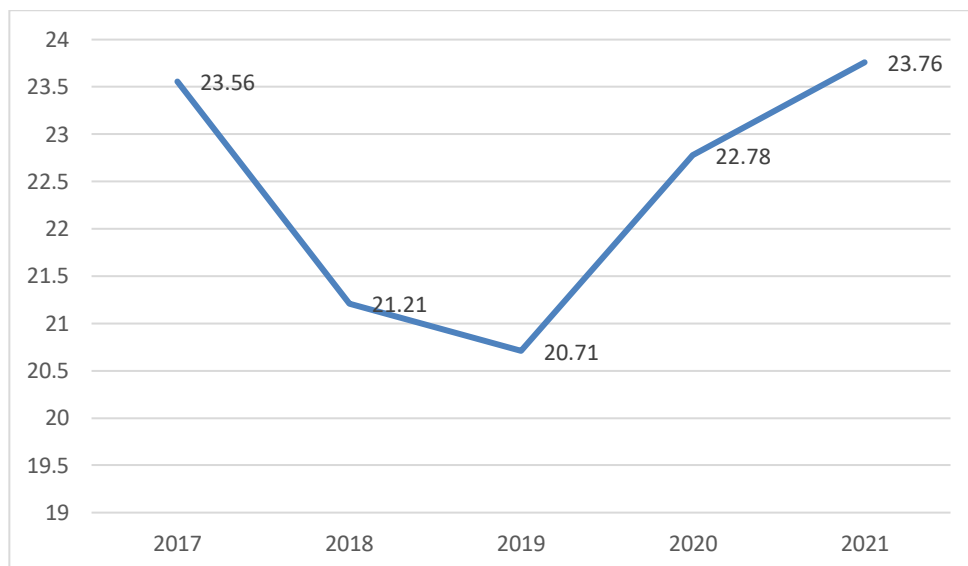
Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2021

NO.	NAMA KABUPATEN	PENDUDUK MISKIN (%)
1	Sampang	23,76
2	Sumenep	20,51
3	Bangkalan	21,57
4	Probolinggo	18,91
5	Tuban	16,31
6	Ngawi	15,57
7	Pamekasan	15,3
8	Pacitan	15,11
9	Bondowoso	14,73
10	Lamongan	13,86
	Jawa Timur	11,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa, Kabupaten Sampang adalah kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2021 dengan 23,76 persen. Persentase ini lebih tinggi

dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Jawa Timur dengan 11,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Sampang masih tergolong sangat tinggi. Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Sampang. Pada tahun 2017 hingga 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang mengalami penurunan secara signifikan. Tetapi ketika pandemic Covid-19 melanda Indonesia persentase kemiskinan di Kabupaten Sampang kembali meningkat.



Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Kabupaten Sampang Tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021 (Diolah)

Pembangunan suatu desa dapat ditingkatkan dengan mengembangkan potensi yang terdapat di desa tersebut sekaligus sebagai wadah masyarakat untuk mengembangkan diri dan lingkungannya (Yulistiyono & Pambudi, 2022). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dengan menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi. Kelembagaan ekonomi yang dimaksudkan adalah sebuah wadah yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan program yang diandalkan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. BUMDes adalah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang terdiri dari masyarakat suatu desa yang dipercayai oleh pemerintah desa guna menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa (Sarmin, 2018). Berikut adalah data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdapat di Kecamatan Sokobanah beserta tahun berdiri dan status BUMDes tersebut.

Tabel 1. 2 Data BUMDes di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

No.	DESA	NAMA BUMDES	TAHUN BERDIRI	STATUS BUMDES
1	Desa Tobaibarat	Maju Sejahtera	2015	Berkembang
2	Desa Tobai Tengah	Murni Jaya	2015	Pemula
3	Desa Tobai Timur	Sumber Rejeki	2019	Pemula
4	Desa Bira Tengah	Mitra Mandiri	2019	Berkembang
5	Desa Sokobanah Laok	Sumber Makmur	2019	Pemula
6	Desa Tamberu Laok	Mutiara Usaha	2019	Pemula
7	Desa Tamberu Daya	Karya Mandiri	2020	Pemula
8	Desa Sokobanah Tengah	Salam Satu Hati	2019	Pemula
9	Desa Sokobanah Daya	Mitra Perkasa	2020	Pemula
10	Desa Tamberu Barat	Cahaya Abadi	2019	Pemula
11	Desa Tamberu Timur	Fajar Indah	2019	Pemula

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa, terdapat sebelas BUMDes dari dua belas desa di Kecamatan Sokobanah. Dari sebelas desa yang ada terdapat dua desa yang berstatus berkembang. Sedangkan Sembilan lainnya masih termasuk BUMDes pemula. BUMDes Mitra Mandiri desa Bira Tengah berdiri pada tahun 2019, tetapi sudah mampu menjadi BUMDes yang berkembang. Jika dibandingkan dengan BUMDes Mitra Jaya desa Tobai Tengah yang berdiri pada tahun 2015 tetapi masih menjadi BUMDes pemula. Hal ini menunjukkan betapa gigihnya masyarakat desa Bira Tengah dalam mengelola BUMDes tersebut.

Pendirian badan usaha ini harus disertai oleh dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha tersebut dari ancaman para pemilik modal yang lebih besar. BUMDes sebagai suatu lembaga yang baru ditingkat desa sudah pasti mengalami banyak peluang dan tantangan. Sehingga desa memerlukan tata kelola BUMDes yang mampu bersaing dan memanfaatkan peluang yang ada untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian (Agunggunanto et al., 2016). Selain itu, BUMDes juga memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang, mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi. Jika BUMDes yang ada didukung oleh kebijakan yang memadai, dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi pedesaan akan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes juga diharapkan menjadi salah satu upaya penguatan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal desa dengan partisipasi masyarakat desa untuk menjalankan BUMDes tersebut.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki berbagai macam kekayaan dan keanekaragaman alam yang tersebar dari sabang sampai merauke. Pulau Madura adalah salah satu pulau yang memiliki banyak sekali kekayaan dan keanekaragaman alam, tidak terkecuali di desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Potensi yang ada di desa Bira Tengah diantaranya adalah pantai, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Kekayaan dan keanekaragaman alam yang ada dapat memberikan dampak positif apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

Keberadaan BUMDes sangat diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan (Sayuti, 2011).

BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang menawarkan sumberdaya lokal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang berpihak kepada masyarakat desa setempat (Salihin, 2021). Selain itu, BUMDes juga merupakan lembaga yang memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. Diantaranya adalah mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan keluarga, dan lain sebagainya. BUMDes berperan langsung dalam meningkatkan tata kelola perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (Firdaus, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kafabih (2018) menyatakan bahwa BUMDes mampu mengatasi berbagai hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di desa. BUMDes mampu meningkatkan PADes dan memberikan berbagai pelayanan sosial bagi masyarakat yang ada di desa. Diantaranya adalah menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, pupuk bersubsidi, dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salam (2018) menyatakan bahwa BUMDes dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan potensi desa. Dengan adanya potensi desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan desa maupun pendapatan masyarakat. BUMDes menjadi solusi bagi masyarakat miskin untuk menuju masyarakat sejahtera, berupa peningkatan pendapatan, mengurangi pengangguran, sehingga dapat meminimalisir kemiskinan.

Desa Bira Tengah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang memiliki delapan dusun, yaitu dusun Batu Lenger Barat, Batu Lenger Timur, Polay Daya, Polay Laok, Polay Barat, Polay Timur, Gua Lorong dan Bandan. Secara administratif Desa Bira Tengah sebelah

utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan desa Pangereman, sedangkan sebelah selatan dan timur berbatasan dengan desa Bira Timur. Luas wilayah Desa Bira Tengah pada tahun 2020 adalah 11,29 km² dan merupakan desa terluas ketiga di kecamatan Sokobanah (BPS, 2021).

Pada tahun 2020, desa Bira Tengah adalah desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Sokobanah dengan 9.538 Jiwa. Banyaknya jumlah penduduk secara tidak langsung membutuhkan banyak lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja yang ada sehingga pendapatan yang diperoleh diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Sokobanah, jumlah keluarga yang tergolong penduduk miskin juga masih cukup tinggi yaitu berjumlah 1.200 KPM.

Badan usaha milik desa adalah suatu badan usaha yang dikelola secara mandiri oleh desa dengan bantuan perangkat desa dan masyarakat setempat. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa diharapkan mampu mengelola perekonomian secara mandiri. BUMDes di desa Bira Tengah diberi nama BUMDes "Mitra Mandiri" yang berdiri tahun 2019 dengan empat orang sebagai perintis pertama. Tujuan pertama didirikannya BUMDes hanya mengikuti anjuran dari pemerintah, tidak ada tujuan khusus yang mengarah pada pariwisata. Tetapi dengan tekad yang kuat BUMDes Mitra Mandiri dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mengurangi pengangguran, dan mengurangi angka kemiskinan di Desa Bira Tengah.

BUMDes memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian di Desa Bira Tengah. Terdapat tiga unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Mitra Mandiri, yaitu pariwisata, perdagangan, dan jasa sablon. Tidak terdapat aturan tertulis yang menjadi prasyarat masyarakat Desa Bira Tengah untuk dapat berdagang di

pantai Lon Malang. Pengelola BUMDes Mitra Mandiri memperbolehkan siapapun untuk berdagang di pantai Lon Malang dengan catatan harus yang berdomisili di Desa Bira Tengah. Selain itu juga harus memperoleh izin dari ketua BUMDes dan Kepala Desa.

Potensi yang dikelola oleh BUMDes ini berfokus pada sektor pariwisata pantai Lon Malang. Saat ini tenaga kerja yang bergabung di BUMDes Mitra Mandiri berjumlah 36 orang. Jumlah tenaga kerja yang ada akan meningkat pada saat hari libur, tahun baru, dan saat perayaan hari-hari tertentu. Penambahan tenaga kerja tersebut dapat mencapai 80 orang tenaga kerja. Termasuk tenaga kerja yang ada setiap saat. Hal tersebut sedikit demi sedikit dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kemiskinan dan BUMDes dengan judul: **“Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Bira Tengah kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh BUMDes dari sisi ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bira Tengah?
2. Bagaimana pengaruh BUMDes dari sisi sosial terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bira Tengah?
3. Bagaimana pengaruh BUMDes dari sisi lingkungan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bira Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh BUMDes dari sisi ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bira Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh BUMDes dari sisi sosial terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bira Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh BUMDes dari sisi lingkungan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Bira Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai:

1. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Desa Bira Tengah dalam menentukan kebijakan yang tepat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
2. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pengelola untuk pengembangan BUMDes agar lebih berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Bira Tengah.
3. Diharapkan dapat menjadi literatur studi pustaka sebagai referensi penelitian selanjutnya.